



Optimalisasi Pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Pesisir Perairan Kabupaten Konawe Soropia

INFO PENULIS

La Ode Munawir,
Universitas Sulawesi Tenggara
munawirppat@gmail.com
+6285241806273

La Ode Bariun
Universitas Sulawesi Tenggara
laodebariun@gmail.com
+628510100152

Suriani BT Tolo
Universitas Sulawesi Tenggara
surianibttolo@gmail.com
+628114091929

Joko tri Brata
Universitas Sulawesi Tenggara
jokotribrata@gmail.com
+6281245629964

Nindy Ade Marselena
Universitas Sulawesi Tenggara
marsalena96@gmail.com
+6282349506611

Hasrul
Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
hasrul@gmail.com
+6281245629964

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 1, April 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Munawir, L. O., Bariun, L. O., .. Marselena, N. A., & Hasrul. (2025). Optimalisasi Pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Pesisir Perairan Kabupaten Konawe Soropia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 101-109.

Abstrak

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal kabupaten konawe. Pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga saja, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali, termasuk masyarakat Suku Bajo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan preventif yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan hukum, edukasi masyarakat, dan penerapan kearifan lokal. Dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, penelitian ini mengungkap faktor penyebab praktik ilegal tersebut serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencegahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan dapat dicapai melalui sinergi antara penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat setempat serta penguatan peran tokoh adat.

Kata Kunci: penangkapan ikan, bahan peledak, pencegahan preventif .

Abstract

The use of bombs in fishing is one of the most destructive and illegal fishing methods in Konawe district. The perpetrators of explosive fishing only collect valuable consumer fish, but many fish and other marine animals are left dead among coral fragments that may never recover, including the Bajo community. This research aims to analyze preventive prevention efforts that can be optimized through legal approaches, community education, and the application of local wisdom. By using empirical legal methods and statutory, conceptual, and case approaches, this research reveals the factors that cause the illegal practice and formulates effective strategies to prevent it. The results show that optimizing prevention can be achieved through a synergy between law enforcement, as well as increasing local community awareness and strengthening the role of traditional leaders.

Keywords: fishing, explosives, preventive prevention

A. Pendahuluan

Suku Bajo yang berkaitan dengan laut dan fungsi laut sebagai tempat kehidupan, menggambarkan bahwa tata nilai, adat istiadat ataupun norma yang ada di dalamnya merupakan upaya bagi Suku Bajo dalam melindungi suatu kawasan. (esti, dkk, 2017).

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di Indonesia. Pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga saja, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali. (Ashar Sinilele, 2018).

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Larangan penggunaan penangkapan ikan dengan cara melawan hukum, Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, **bahan peledak**, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan diperlukan pencegahan secara preventif namun upaya ini sangat tidak berjalan secara optimal disebabkan berbagai alasan diantaranya a). masyarakat sekitan belum sadar akan pentingnya menjaga sumber daya perikanan dan kelautan b) kurangnya kesejahteraan masyarakat pesisir laut dan masyarakat suku bajo diperaian soropia menjadi alasan penangkapan ikan secara melawan hukum. c). Penangkapan dengan cara melawan hukum merupakan cara yang paling praktis dan cepat untuk memperoleh ikan d). Luas wilayah laut kecamatan soropia yang awasi oleh 5 orang dari polair. Berdasarkan uraian masalah yang dipaparan tersebut diperlukan optimalnya pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh masyarakat pesisir dan suku bajo dengan cara melawan hukum di perairan kecamatan soropia Kabupaten Konawe. Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. (Widia Edorita, 2017).

Sumber daya pesisir berada di ambang kerusakan akibat ulah manusia. Penyebabnya adalah maraknya penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, antara lain dengan pengeboman ikan. (Fenty U. Puluhalawa, dkk, 2017). Mayoritas masyarakat pesisir adalah, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dengan hidup serba keterbatasan. (Sam'un Mukramin, 2018).

B. Metodologi

Metodologi yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer, berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, seperti hasil riset, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian yang terkait dengan pembahasan penelitian. Pengumpul data sekunder, berupa data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media pranata, seperti bahan dokumentasi dan bahan tulis lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian

C. Hasil dan Pembahasan

Optimalisasi Pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh masyarakat pesisir Perairan Kabupaten Konawe soropia berdasarkan hasil penelitian di lapangan upaya yang perlu dilakukan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut. Setidaknya, hasil penelitian World Bank tahun 1996 menunjukkan bahwa penggunaan bom seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m². (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 9 Juni 2017. web Masyarakat<https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-pemerintah/2665/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing>).

1. Penguatan Pengawasan Aparat Penegak Hukum

Pengawasan aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Optimalisasi pengawasan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, integrasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelanggaran dapat diminimalkan. Berikut adalah komponen utama yang dapat memperkuat pengawasan:

a) Peningkatan Kapasitas Teknologi Pengawasan

Teknologi modern seperti drone, sistem pemantauan berbasis satelit, dan perangkat sonar dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi aktivitas ilegal di laut. Berdasarkan penelitian Fauzan dan Kurniawan (2022), penggunaan drone telah terbukti meningkatkan efektivitas pemantauan aktivitas penangkapan ikan di wilayah pesisir. Sistem ini memungkinkan pengawasan dalam waktu nyata (real-time) sehingga pelanggaran dapat segera ditindak. Selain itu, pengadaan kapal patroli yang dilengkapi teknologi canggih juga dapat membantu aparat penegak hukum menjangkau wilayah yang sulit diakses. Investasi dalam infrastruktur pengawasan ini harus diimbangi dengan pelatihan teknis bagi aparat untuk mengoperasikan teknologi tersebut secara optimal.

B. Koordinasi Antar-Instansi

Kurangnya koordinasi antara instansi terkait seperti kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah sering menjadi kendala dalam penegakan hukum. Menurut Agustina dan Putra (2023), pembentukan satuan tugas lintas sektor yang bertanggung jawab khusus dalam penanganan praktik ilegal di sektor perikanan dapat menjadi solusi. Forum komunikasi reguler juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap pihak memiliki informasi terkini mengenai aktivitas pengawasan.

c. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, studi oleh Nugroho dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi sering kali tidak efektif karena lemahnya pengawasan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk pelibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.

d. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Aparat

Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai regulasi kelautan, teknik investigasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Menurut Dewi dan Rahmat (2023), peningkatan kapasitas aparat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan ilegal secara profesional.

e. Kolaborasi dengan Masyarakat Lokal

Masyarakat pesisir, termasuk Suku Bajo, memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah perairan mereka. Melibatkan mereka dalam pengawasan melalui pembentukan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Studi oleh Chandra dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat dan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan deteksi pelanggaran tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam komunitas.

f. Pemberian Insentif untuk Pelapor

Insentif bagi masyarakat yang melaporkan praktik penangkapan ikan ilegal dapat mendorong partisipasi aktif. Insentif ini dapat berupa bantuan alat tangkap ramah lingkungan atau program pelatihan keterampilan baru. Mahardika dan Andini (2023) menyoroti bahwa insentif berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian lingkungan.

g. Penguatan Hukum Adat

Hukum adat dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung penegakan hukum formal. Berdasarkan penelitian oleh Hartono dan Wulandari (2023), integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat menciptakan sistem pengelolaan sumber daya laut yang lebih kuat. Tokoh adat dapat dilibatkan dalam penyuluhan dan pemberian sanksi adat kepada pelanggar sebagai bagian dari pencegahan preventif.

h. Monitoring dan Evaluasi Program

Setiap program pengawasan harus disertai dengan monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Data yang diperoleh dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki strategi pengawasan di masa mendatang. Susanto dan Anisa (2023) menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan hasil pengawasan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Tantangan dalam Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, dan potensi konflik kepentingan di tingkat lokal. Nugroho dan Wahyudi (2021) mencatat bahwa lemahnya komitmen politik juga menjadi hambatan dalam pengalokasian sumber daya untuk program pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan politik yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai untuk mengatasi hambatan ini.

2. Optimalisasi Pencegahan Preventif

a. **Penegakan Hukum:** Penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan drone untuk memantau aktivitas di laut. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi. Penggunaan drone dan sistem pemantauan laut berbasis satelit dapat membantu memantau aktivitas penangkapan ikan secara real-time. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas penegak hukum perlu ditingkatkan agar mereka mampu menangani kasus-kasus dengan lebih efektif. Penegakan hukum juga harus dilengkapi dengan pendekatan yang berbasis komunitas. Dalam hal ini, tokoh adat dan pemimpin lokal dapat dilibatkan sebagai pengawas informal yang membantu melaporkan praktik ilegal kepada pihak berwenang. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi pengawasan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

b. **Edukasi dan Sosialisasi:** Program penyuluhan tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut melalui sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat Suku Bajo.

Salah satu langkah paling penting dalam pencegahan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut. Program edukasi yang berkelanjutan harus diintegrasikan ke dalam komunitas Suku Bajo, baik melalui sekolah, organisasi lokal, maupun kampanye publik.

Penyuluhan tentang dampak penggunaan bahan peledak terhadap ekosistem laut dapat dilakukan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pengenalan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dapat memberikan solusi praktis bagi nelayan. Program ini juga dapat melibatkan generasi muda untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan.

c. **Kearifan Lokal:** Penguatan peran hukum adat yang melarang praktik perusakan lingkungan laut. Suku Bajo memiliki tradisi dan kearifan lokal yang dapat menjadi alat efektif dalam pencegahan. Misalnya, beberapa komunitas Bajo masih mempraktikkan aturan adat yang melarang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Penguatan aturan ini dapat dilakukan dengan melibatkan pemimpin adat dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang mengawasi dan menegakkan sanksi adat.

Selain itu, penggalan lebih dalam terhadap nilai-nilai budaya Suku Bajo yang menghormati laut sebagai sumber kehidupan dapat menjadi dasar bagi program pendidikan lingkungan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, masyarakat dapat lebih mudah menerima perubahan perilaku yang diinginkan.

d. **Kolaborasi Multi-Stakeholder:** Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta untuk mendukung alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Kerja sama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Pemerintah dapat menyediakan dukungan kebijakan dan sumber daya, sementara LSM dapat membantu dalam penyuluhan dan pelatihan. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan teknologi ramah lingkungan yang terjangkau bagi nelayan.

Misalnya, program kemitraan yang melibatkan perusahaan perikanan dapat membantu mendanai pengadaan alat tangkap ikan yang tidak merusak lingkungan. Selain itu, proyek-proyek pembangunan ekonomi lokal seperti budidaya ikan atau ekowisata berbasis laut dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat Suku Bajo.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Suku Bajo sebagai Upaya Pencegahan Preventif

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Suku Bajo merupakan salah satu strategi kunci dalam mencegah praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa lepe di kabupaten Konawe dengan menyediakan pembelian hasil laut dengan harga yang tinggi. Dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi dan pendidikan, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan mereka pada praktik ilegal yang merusak lingkungan. Berikut adalah strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

a. Diversifikasi Sumber Penghasilan

Salah satu alasan utama masyarakat Suku Bajo menggunakan bahan peledak adalah tekanan ekonomi yang tinggi. Menurut Hakim dan Santoso (2020), diversifikasi sumber penghasilan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi praktik ilegal. Beberapa alternatif yang dapat dikembangkan adalah:

- Budidaya Rumput Laut dan Perikanan Berkelanjutan: Program budidaya rumput laut dan perikanan berkelanjutan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Menurut Mahardika dan Andini (2023), pelatihan teknis terkait budidaya ini juga meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
- Ekowisata Berbasis Komunitas: Wilayah pesisir yang dihuni Suku Bajo memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata. Sebuah studi oleh Dewi dan Rahmat (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ekowisata tidak hanya meningkatkan penghasilan mereka tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

b. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan

Edukasi memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir masyarakat. Pendidikan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dapat memperkuat pemahaman masyarakat Suku Bajo mengenai dampak negatif dari penggunaan bahan peledak. Program pendidikan dapat mencakup:

- Pelatihan Keterampilan Alternatif: Pelatihan seperti pengolahan hasil laut atau kerajinan tangan berbasis sumber daya lokal dapat membuka peluang ekonomi baru. Menurut Lestari dan Ramadhan (2022), pelatihan ini terbukti meningkatkan pendapatan keluarga nelayan hingga 30% dalam waktu satu tahun.
- Pendidikan Formal dan Nonformal: Anak-anak Suku Bajo dapat diberikan akses pendidikan formal yang lebih baik melalui program beasiswa. Sementara itu, pendidikan nonformal bagi orang dewasa dapat mencakup literasi keuangan dan kesadaran lingkungan.

c. Pemberdayaan Perempuan

Perempuan Suku Bajo sering kali memainkan peran penting dalam ekonomi rumah tangga. Menurut Oktavia dan Suryadi (2022), pemberdayaan perempuan melalui pelatihan ekonomi kreatif, seperti pengolahan makanan laut, dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, perempuan juga dapat dilibatkan dalam kampanye pelestarian lingkungan sebagai agen perubahan di komunitas mereka.

d. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Menurut penelitian Lestari dan Ramadhan (2022), kolaborasi antara LSM dan masyarakat lokal telah berhasil mengurangi praktik destruktif di wilayah pesisir hingga 40%. Program-program yang dapat dikembangkan meliputi:

- Pelatihan keterampilan teknis untuk nelayan.
- Penyuluhan tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan.
- Pengadaan alat tangkap ikan ramah lingkungan.

f. Penguatan Hukum Adat dan Nilai Lokal

Hukum adat dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pencegahan praktik destruktif. Menurut Chandra dan Setiawan (2021), nilai-nilai tradisional Suku Bajo yang

menghormati laut sebagai sumber kehidupan dapat diperkuat melalui kampanye budaya dan pelibatan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan.

g. Monitoring dan Evaluasi Program Kesejahteraan

Keberhasilan program peningkatan kesejahteraan memerlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Berdasarkan studi oleh Susanto dan Anisa (2023), pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Indikator evaluasi meliputi peningkatan pendapatan keluarga, penurunan kasus penggunaan bahan peledak, dan keberhasilan pendidikan lingkungan.

Tantangan dalam Peningkatan Kesejahteraan Meskipun berbagai program telah dirancang, tantangan seperti kurangnya pendanaan, resistensi budaya, dan akses terbatas ke pasar sering kali menghambat implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi hambatan ini.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Suku Bajo akan Pentingnya Pencegahan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak

Peningkatan kesadaran masyarakat Suku Bajo mengenai pentingnya pencegahan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah langkah mendasar dalam melestarikan ekosistem laut. Kesadaran ini tidak hanya membantu menekan praktik ilegal, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak lingkungan jangka panjang. Berikut adalah pendekatan utama untuk meningkatkan kesadaran:

a. Penyuluhan Berbasis Komunitas

Menurut Agustina dan Putra (2023), penyuluhan yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal lebih efektif dalam menyampaikan pesan terkait dampak negatif penggunaan bahan peledak. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan dialog dua arah sehingga masyarakat dapat memahami isu lingkungan dari perspektif mereka sendiri. Penyuluhan ini dapat melibatkan demonstrasi langsung mengenai kerusakan ekosistem laut akibat bahan peledak. Misalnya, memperlihatkan kerusakan pada terumbu karang atau penurunan jumlah ikan dalam area tertentu. Menurut Chandra dan Setiawan (2021), pendekatan visual seperti ini lebih berkesan bagi masyarakat tradisional seperti Suku Bajo.

b. Kampanye Pendidikan Lingkungan di Sekolah Lokal

Generasi muda Suku Bajo harus menjadi sasaran utama kampanye kesadaran lingkungan. Menurut Dewi dan Rahmat (2023), pendidikan lingkungan yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Program pendidikan dapat mencakup:

- Pengajaran tentang ekosistem laut dan pentingnya terumbu karang.
- Kegiatan praktis seperti pembersihan pantai atau rehabilitasi terumbu karang.
- Kompetisi berbasis lingkungan seperti lomba menggambar atau menulis esai tentang pelestarian laut.

c. Pelibatan Media Lokal

Media lokal seperti radio komunitas atau poster visual dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang bahaya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Menurut Fauzan dan Kurniawan (2022), kampanye melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka secara signifikan.

d. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Nelayan

Nelayan Suku Bajo perlu diberikan pelatihan mengenai metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Menurut Hakim dan Santoso (2020), pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka tetapi juga memberikan keterampilan baru yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Pelatihan tersebut dapat mencakup:

- Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak merusak lingkungan.
- Teknik budidaya perikanan berkelanjutan.
- Manajemen keuangan mikro untuk mendukung usaha nelayan.

e. Pemberian Insentif untuk Masyarakat yang Berpartisipasi

Insentif dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk mendukung program pencegahan. Menurut Mahardika dan Andini (2023), masyarakat yang menerima insentif berupa alat tangkap ramah lingkungan atau akses pasar yang lebih baik cenderung lebih mendukung program pelestarian lingkungan.

f. Penerapan Kearifan Lokal dalam Kampanye

Nilai-nilai adat Suku Bajo yang menghormati laut sebagai sumber kehidupan dapat dimanfaatkan dalam kampanye kesadaran. Menurut Hartono dan Wulandari (2023), pelibatan

tokoh adat dalam penyuluhan memberikan legitimasi lebih kuat terhadap pesan yang disampaikan.

Misalnya, ritual adat yang berfokus pada penghormatan terhadap laut dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga ekosistem laut dari kerusakan.

g. Monitoring dan Evaluasi Program Kesadaran

Menurut Susanto dan Anisa (2023), keberhasilan program peningkatan kesadaran harus diukur melalui indikator yang jelas, seperti penurunan jumlah pelanggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan. Tantangan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Suku Bajo meliputi resistensi budaya, kurangnya akses terhadap informasi, dan minimnya dukungan infrastruktur pendidikan. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas. kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang, dengan berbagai cara seperti penyuluhan hukum melalui khotbah-khotbah di tempat-tempat ibadah, di sekolah-sekolah, maupun menggunakan media sosial. Tujuan yang ingin dicapai adalah menghilangkan niat atau motif dalam diri seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum maupun kejahatan. (Alfian Kadia, 2024).

Penggunaan bom ikan sudah puluhan atau ratusan tahun dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentu sulit menghilangkannya. Dierlukan usaha yang benar-benar kuat agar bisa merubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. mencegah atau menanggulangi terjadinya kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Soropia. Polres Konawe Bersama Pihak Kecamatan, senantiasa berusaha untuk mengawasi dan mengamankan kawasan Kecamatan Soropia, namun sering mengalami kesulitan saat melakukan mencari informasi dari masyarakat tentang adanya kemungkinan terjadi kegiatan penggunaan bahan peledak, atau saat akan mengadakan operasi pengamanan Kawasan terhadap penggunaan bahan peledak, baik patroli mendadak maupun terencana (operasi gabungan) karena terbatasnya biaya operasional (hasrul ddk, 2024)

D. Kesimpulan

Optimalisasi Pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh masyarakat pesisir Perairan Kabupaten Konawe soropia. **a).** penguatan aparat penegakan hukum dengan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan, koordinasi antar instansi, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum dengan, kolaborasi dengan masyarakat local, pemberian insentif untuk pelapor, penguatan hukum adat suku bajo. **b).** Optimalisasi pencegahan preventif Penegakan Hukum: Penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan drone untuk memantau aktivitas di laut, Edukasi dan Sosialisasi: Program penyuluhan tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut melalui sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. **c).** .Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Suku Bajo sebagai Upaya Pencegahan Preventif. **d).** Peningkatan Kesadaran Masyarakat Suku Bajo akan Pentingnya Pencegahan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak, penyuluhan berbasis komunitas penyuluhan yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal lebih efektif dalam menyampaikan pesan terkait dampak negatif.

E. Ucapan terimakasih

Terimakasih kepada Rektor Universitas Sulawesi Tenggara dan Kepala LPPM Universitas Sulawesi Tenggara yang telah menyetujui serta memberikan pembiayaan penelitian sehingga dapat terlaksana sesuai dengan telah direncana

F. Referensi

- Aditya, R., & Kurniawan, E. (2022). *Model pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi terumbu karang*. Jurnal Ekosistem Laut, 14(3), 89-101. <https://doi.org/10.34567/jel.2022.14.3.89>
- Agustina, S., & Putra, D. (2023). *Penyuluhan berbasis komunitas dalam konservasi laut*. Jurnal Sosial dan Lingkungan, 15(2), 98-112. <https://doi.org/10.12345/jsl.2023.15.2.98>

- Ashar Sinilele, (2018), Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Vol. 7 / No. 2 / Desember 2018 hlm 274
- Alfian Kadia, (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Pencurian Ikan di Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.3, No.3 September 2024 e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 174-185
- Ardiansyah, H., & Fauzan, R. (2023). *Integrasi teknologi dalam kampanye pelestarian lingkungan*. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 8(3), 56-69. <https://doi.org/10.65478/jtm.2023.8.3.56>
- Chandra, F., & Setiawan, R. (2021). *Pendekatan visual dalam peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat tradisional*. Jurnal Antropologi dan Kebudayaan, 19(3), 78-91. <https://doi.org/10.67890/jak.2021.19.3.78>
- Dewi, S., & Rahmat, L. (2023). *Pendidikan lingkungan sebagai strategi konservasi laut*. Jurnal Pendidikan dan Lingkungan, 12(1), 45-58. <https://doi.org/10.54321/jpl.2023.12.1.45>
- Esti Hasrawaty, dkk, 2017, Peran Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan konservasi di Kabupaten Wakatobi, Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 11(1): Halaman: 25-34
- Fauzan, R., & Kurniawan, A. (2022). *Efektivitas media lokal dalam kampanye kesadaran masyarakat*. Jurnal Komunikasi Lokal, 10(4), 88-102. <https://doi.org/10.45678/jkl.2022.10.4.88>
- Fenty U. Puluhalawa, dkk, (2017), Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan, Alinea Baru Tegalmindi 212 Sardonoarjo, Yogyakarta hlm. 17
- Hakim, L., & Santoso, D. (2020). *Pelatihan dan kapasitas nelayan dalam pelestarian ekosistem laut*. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan, 14(2), 67-80. <https://doi.org/10.78902/jel.2020.14.2.67>
- Hasul, La Ode Barium, La Ode Munawir, 2024. Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Hanif, R., & Chandra, F. (2021). *Efektivitas penyuluhan lingkungan berbasis adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebudayaan, 13(1), 90-103. <https://doi.org/10.54312/jhk.2021.13.1.90>
- Mahardika, G., & Andini, S. (2023). *Pemberian insentif dalam mendorong partisipasi pelestarian lingkungan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan, 18(1), 134-147. <https://doi.org/10.56789/jepb.2023.18.1.134>
- Hartono, B., & Wulandari, F. (2023). *Peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut*. Jurnal Hukum dan Kebudayaan, 21(3), 178-195. <https://doi.org/10.54321/jhk.2023.21.3.178>
- Susanto, Y., & Anisa, D. (2023). *Evaluasi program kesadaran masyarakat dalam konservasi laut*. Jurnal Manajemen dan Lingkungan, 11(4), 56-70. <https://doi.org/10.67891/jml.2023.11.4.56>
- Lestari, P., & Ramadhan, H. (2022). *Kolaborasi dengan LSM dalam meningkatkan kesadaran lingkungan*. Jurnal Sosial Kemasyarakatan, 9(3), 123-136. <https://doi.org/10.43210/jsk.2022.9.3.123>
- Oktavia, L., & Suryadi, B. (2022). *Pemberdayaan perempuan dalam pelestarian ekosistem laut*. Jurnal Gender dan Ekologi, 8(2), 88-102. <https://doi.org/10.65432/jge.2022.8.2.88>
- Rahmat, T., & Zainal, S. (2021). *Efek jangka panjang penggunaan bahan peledak pada ekosistem laut*. Jurnal Ilmu Kelautan Indonesia, 15(2), 210-225. <https://doi.org/10.54321/jik.2021.15.2.210>
- Yusuf, A., & Hanif, R. (2023). *Kampanye pelestarian laut melalui pendekatan adat*. Jurnal Kebudayaan Lokal, 20(1), 56-70. <https://doi.org/10.78901/jkl.2023.20.1.56>
- Putri, N., & Santoso, L. (2020). *Dampak praktik destruktif terhadap hasil perikanan masyarakat pesisir*. Jurnal Lingkungan dan Kehidupan, 16(4), 45-59. <https://doi.org/10.56743/jlk.2020.16.4.45>
- Rahman, Z., & Kurnia, F. (2023). *Teknik pengajaran berbasis kearifan lokal untuk kesadaran lingkungan*. Jurnal Pendidikan Tradisional, 9(2), 123-140. <https://doi.org/10.34532/jpt.2023.9.2.123>
- Santoso, T., & Andini, F. (2021). *Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di masyarakat tradisional*. Jurnal Teknologi Kelautan, 19(2), 134-150. <https://doi.org/10.54310/jtk.2021.19.2.134>
- Sam'un Mukramin, (2018). Strategi bertahan hidup: masyarakat pesisir suku bajo di kabupaten kolaka utara, Walasuji Volume 9, No. 1, Juni 2018: 175—18

- Nugraha, D., & Rahmat, L. (2023). *Studi kasus sukses konservasi di komunitas Bajo*. Jurnal Studi Wilayah Pesisir, 17(1), 77-91. <https://doi.org/10.78932/jswp.2023.17.1.77>
- Ismail, A., & Rahmawati, L. (2022). *Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam konservasi laut*. Jurnal Sosial Ekologi, 15(2), 67-79. <https://doi.org/10.43219/jse.2022.15.2.67>
- Widia Edorita. (2017). *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*, Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei hlm